

**PENGARUH ALOKASI PENGELUARAN
PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI,
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2014-2017**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

AGUSTYA HAFIDZA SAVITRI

NIM. 12020114120014

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

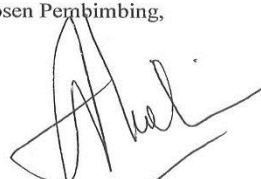
2019

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Agustya Hafidza Savitri
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114120014
Fakultas / Jurusan : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **PENGARUH ALOKASI PENGELUARAN
PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI,
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2014-2017**
Dosen Pembimbing : Dra. Herniwati Retno Handayani, MS.

Semarang, 31 Desember 2018

Dosen Pembimbing,



Dra. Herniwati Retno Handayani, MS.
NIP. 19551128 198103 2004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Agustya Hafidza Savitri
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114120014
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Judul Skripsi : PENGARUH ALOKASI PENGELUARAN
PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI,
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2014-2017.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 17 Januari 2019

Tim Penguji :

1. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS. (.....)
2. Dr. Agr, Deden Dinar Iskandar, S.E., MA (.....)
3. Nenek Woyanti, S.E., M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Agustya Hafidza Savitri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh Alokasi Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat, atau pemikiran, dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, artinya gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 31 Desember 2018

Penulis Skripsi,

Agustya Hafidza Savitri

NIM 12020114120014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Siapapun yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Mungkin saya melakukan kesalahan kemarin. Namun diri saya yang kemarin tetaplah bagian dari diri saya yang sekarang. Hari ini, saya dengan segala kesalahan dan kekeliruan saya. Hari esok, saya mungkin bisa menjadi lebih bijak dan diri itu juga adalah bagian dari diri saya. Saya datang untuk mencintai diri saya untuk siapa saya sekarang, siapa saya dulu dan siapa yang saya harapkan kedepannya.”

(Kim Namjoon, BTS)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk Allah SWT. Sebagai rasa syukur atas ridho serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk Bapak dan Ibu yang senantiasa rela berkorban demi anaknya.

Adik yang luar biasa dalam memberikan support

Semua pihak yang mendukung penulis sampai pada tahap ini

ABSTRACT

The poverty in East Java in 2014-2017 was constantly decreasing, however the people in poverty was still relatively high. In order to alleviate the poverty, the government has to prioritise the budget for poverty alleviation programs. These programs are expected to comprehensively cover the poor as the main target.

The objective of this study is analyzing the effect of spending on economy, education, health and social protection against poverty in East Java Province 2014-2017. The analytical method used in this study is panel data regression. Panel data is combination of time series data from 2014 until 2017 and the cross section data as much as 38 districts/cities that produce 152 observations. The results showed that Fixed Effects Model (FEM) is the most appropriate.

Based on the research result is the government spending on economy has a positive effect on poverty. While the government spending on education, health and social protection has negative effect on poverty.

Keywords : Poverty Rate, Government spending on: Economy, Education, Health, Social Protection

ABSTRAKSI

Kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2014-2017 terus menurun, namun penduduk miskin masih relatif tinggi. Untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan. Program-program ini diharapkan dapat mencakup secara komprehensif penduduk miskin sebagai target utamanya.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh alokasi pengeluaran di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2014-2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Data panel adalah kombinasi data time series dari tahun 2014 sampai 2017 dan data cross section sebanyak 38 kabupaten/kota yang menghasilkan 152 observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode yang paling sesuai adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Berdasarkan hasil estimasi, pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci : Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Di Bidang: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya serta bantuan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Pengaruh Alokasi Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017”*. Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kelulusan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Bimbingan, dorongan dan bantuan dari pengajar, rekan-rekan serta ketulusan hati dan keramahan dari banyak pihak, sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan harapan dapat mencapai hasil sebaik mungkin. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Akhmad Syakir Kurnia S.E, M.Si, Ph.D. selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dra. Herniwati Retno Handayani, MS., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staf Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya dengan penulis
5. Kedua orang tua penulis, ibunda tercinta dan juga ayahanda, sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam pengerjaan skripsi. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dek Elsa dan Mbah Putri yang senantiasa memberikan semangat dan do'a selama pengerjaan skripsi berlangsung.
6. Sahabat Pejuang: Nia Rifanda, Nabilla Aulia, Rizma Zamiluni, Dian Priastiwi, Fauziah Khoirunnisa, Syifa Zaidatun, Afnurul Widya dan seluruh teman-teman seperjuangan IESP angkatan 2014, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas pengalaman dan kebersamaan selama hampir 4 tahun terakhir ini.
7. Tim KKN Desa Lanjan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang : Farah, Anisqe, Sheilla, Novi, Intan, Yohanes, Silvarian, Dodi dan Mas Luqman atas pengalamannya dan keceriaan saat bersama.
8. Dina, Rizky, Irma, Fita, Sonia, Ghina, Laili dan seluruh Keluarga UKM-F Sepak Bola dan Futsal FEB atas pengalamannya dalam kerjasama dan berorganisasi.
9. Anggota *Bangtan Boys* beserta seluruh keluarga *Adorable Representative M.C for Youth* yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih ada kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Semarang, 31 Desember 2018

Penulis Skripsi,

Agustya Hafidza Savitri

NIM 12020114120014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1.4 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori	21
2.1.1 Teori Ekonomi Publik.....	21
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	22
2.1.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	32
2.1.4 Konsep dan Definisi Kemiskinan	34
2.1.5 Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal	41
2.1.6 Otonomi Daerah.....	45
2.1.7 Gambaran Umum APBD	46
2.2 Hubungan Antara Variabel Independen Terhadap Dependen	49

2.2.1	Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Dengan Kemiskinan.....	49
2.2.2	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dengan Kemiskinan	50
2.2.3	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan Kemiskinan	51
2.1.7	Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial dengan Kemiskinan.....	52
2.2	Penelitian Terdahulu.....	52
2.3	Kerangka Pemikiran	68
2.4	Hipotesis	71
BAB III	METODE PENELITIAN.....	72
3.1	Variabel Penelitian	72
3.2	Definisi Operasional.....	72
3.3	Jenis dan Sumber Data	74
3.4	Metode Pengumpulan Data	75
3.5	Metode Analisis.....	76
3.5.1	Pengujian Model Data Panel.....	80
3.5.2	Model Estimasi Regresi	81
3.5.3	Deteksi Asumsi Klasik.....	84
3.5.4	Pengujian Model	87
BAB IV	92
HASIL DAN PEMBAHASAN	92
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	92
4.1.1	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	92
4.1.2	Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Ekonomi.....	94
4.1.3	Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan	97
4.1.4	Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan.....	99
4.1.5	Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Perlindungan Sosial	101
4.2	Analisis Data	103
4.2.1	Uji Kesesuaian Model.....	103

4.2.2 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	104
4.2.3 Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	105
4.2.4 Hasil Uji Statistik.....	109
4.3 Interpretasi Hasil.....	111
4.3.1 Pengaruh Alokasi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	113
4.3.2 Pengaruh Alokasi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan	116
4.3.3 Pengaruh Alokasi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan	117
4.3.4 Pengaruh Alokasi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pelindungan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	118
BAB V PENUTUP.....	120
5.1 Simpulan.....	120
5.3 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2017	4
Tabel 1. 2 Presentase Jumlah Penduduk Pulau Jawa 2014-2017	5
Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2010-2017	6
Tabel 1.4 Pertumbuhan Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur 2014-2017.....	7
Tabel 1. 5 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2014-2017	10
Tabel 1.6 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2014-2017	11
Tabel 1.6 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan di Pulau Jawa Tahun 2014-2017	12
Tabel 1.6 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2014-2017	13
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	61
Tabel 4. 1 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017.....	93
Tabel 4. 2 Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi	96
Tabel 4. 3 Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan .	98
Tabel 4. 4 Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	100
Tabel 4. 5 Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial.....	103
Tabel 4.6 Uji Chow	103
Tabel 4.7 Uji Hausman	104
Tabel 4. 8 Ringkasan Hasil Estimasi.....	105
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	107
Tabel 4. 10 Uji Heteroskedastisitas.....	108
Tabel 4. 11 Hasil Uji t.....	109
Tabel 4. 12 Koefisien Dummy.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	28
Gambar 2. 2 Teori Peacock dan Wiseman	30
Gambar 2. 3 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	31
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran	70
Gambar 4. 1 Uji Normalitas Jarque-Bera.....	106

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Data Variabel Regresi	126
LAMPIRAN B Uji Penyempingan Asumsi Klasik.....	126
LAMPIRAN C Uji <i>Chow</i>	133
LAMPIRAN D Uji <i>Hausman</i>	134
LAMPIRAN E Deteksi Normalitas Jarque-Bera	134
LAMPIRAN F Deteksi Heteroskedastisitas	135
LAMPIRAN G Deteksi Multikolinearitas	136
LAMPIRAN H Uji t	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan pada semua aspek kehidupan masyarakat suatu negara untuk menuju situasi yang lebih baik. Pembangunan ekonomi nasional merupakan kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Sehingga pada dasarnya penanggulangan kemiskinan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro, 2006). Kartasmita (2006) menyatakan upaya dalam pembangunan lingkup nasional harus dibarengi dengan pembangunan tingkat sektoral dan regional. Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini karena kemiskinan, menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator sosial yang paling penting dalam pembangunan ekonomi.

Konsep kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (2016) adalah kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan pendekatan ini, BPS merumuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran per kapita per bulan dipakai sebagai variabel yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai garis kemiskinan (GK) untuk menentukan seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin. Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Menurut World Bank (2000), definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (*Depriving of well being*). Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. Pertama, dari pandangan konvensional kemiskinan dipandang dari sisi moneter, di mana kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu. Jika mereka berada di bawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin. Kemiskinan dalam Kuncoro (2004) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Indikator kemiskinan menurut Bappenas (2006) adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya

kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga. Ritonga (2003) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Edi Suharto (2005) ialah kelemahan dan pilihan pilihan individu, lemahnya pengaturan pendapatan, lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh) serta adanya ketimpangan struktur ekonomi politik dan ketidakadilan sosial. Persoalan dan masalah kemiskinan sesungguhnya selalu adanya keterkaitan dengan kerentanan dan juga ketidakberdayaan. Kerentanan yang ada pada orang miskin, biasanya disebabkan karena orang miskin dihadapkan dengan kondisi yang lemah. Maka tidak mempunyai daya kemampuan yang cukup di banyak bidang dan berbagai bidang, dan kemudian secara ekonomi dibarengi oleh kemiskinan pada tingkat pendidikan, sedikit ilmu/pengetahuan/wawasan. Juga tidak memiliki keberdayaan, dan serta tidak memiliki kekuasaan. Lemahnya sistem pertahanan ekonomi yang kemudian telah mempengaruhi atas ketahanan pada banyak bidang. Penduduk

miskin di Indonesia relatif masih tinggi, walaupun cenderung menurun seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
2014	27.727.780	10,96 %
2015	28.513.570	11,13 %
2016	27.764.320	10,70 %
2017	26.582.990	10.12 %

Sumber : Badan Pusat Statistik 2014-2017

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hanya saja pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,17 %. Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah keuangan yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001).

Masalah kemiskinan memang telah lama menjadi problema sejak dahulu. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara- negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju.

Tabel 1. 2
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Enam di Pulau Jawa
Tahun 2014-2017

No.	Provinsi	Penduduk Miskin			
		2014	2015	2016	2017
1.	DKI Jakarta	4,09	3,61	3,75	3,78
2.	Jawa Barat	9,18	9,57	8,77	7,83
3.	Jawa tengah	13,8	13,32	13,19	12,23
4.	DI Yogyakarta	14,55	13,16	13,10	12,36
5.	Jawa Timur	12,28	12,28	11,85	11,20
6.	Banten	5,51	5,75	5,36	5,59

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di enam provinsi di pulau Jawa dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 kemiskinan Jawa Timur menempati posisi tiga tertinggi yaitu sebesar 11,20 persen. Sampai tahun 2017 urutan pertama ditempati oleh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,36 persen . Diurutan kedua ditempati oleh provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,23 persen. Dirutan keempat ditempati oleh provinsi Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,83 persen. Dan diurutan kelima dan terakhir ditempati oleh provinsi Banten dan DKI Jakarta dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,59 persen dan 3,78 persen.

Provinsi Jawa Timur sebagai lingkup daerah yang akan di teliti merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Peran pemerintah sangat berarti dalam mengurangi kemiskinan. Program-program pembangunan yang mempunyai sasaran pada penduduk miskin sangat beragam, baik ditinjau dari segi sektor program pembangunan, sektor alokasi anggaran, maupun sektor instansi penyelenggara, pelaksana program dan penanggung jawab program. Dalam menyelesaikan masalah pembangunan

(kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan), kebijakan yang diambil oleh pemerintah tertuang pada anggaran yang dikeluarkan. Jawa Timur dapat dikatakan sebagai provinsi yang berkembang dalam bidang ekonomi. Namun, Jawa Timur masih memiliki permasalahan dalam penanganan tingkat kemiskinan. Data mengenai jumlah penduduk miskin di pulau jawa dalam kurun tahun 2014-2017 dapat dilihat dalam tabel 1.3 sebagai berikut

Tabel 1. 3
Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2010-2017

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin			
		2014	2015	2016	2017
1.	DKI Jakarta	412.790	368.670	385.840	385.840
2.	Jawa Barat	4.238.960	4.485.650	4.168.110	3.774.410
3.	Jawa tengah	4.561.820	4.505.780	4.493.750	4.197.490
4.	DI Yogyakarta	532.590	485.560	488.830	466.330
5.	Jawa Timur	4.748.420	4.775.970	4.638.530	4.405.270
6.	Banten	649.190	690.670	657.740	657.740

Sumber: Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk Miskin, diolah.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di enam provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 kemiskinan Jawa Timur menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 4.405.270. Diurutan kedua ditempati oleh provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.197.490. Diurutan ketiga ditempati oleh provinsi Jawa Barat sebesar 3.774.410. Dirutan keempat ditempati oleh provinsi Banten dengan jumlah penduduk miskin sebesar 657.740. Dan diurutan kelima dan terakhir ditempati oleh provinsi DIY dan DKI Jakarta dengan tingkat kemiskinan sebesar 466.330 dan 385.840. Luas wilayah serta jumlah total penduduk yang besar dapat menjadi penyebab tingginya angka penduduk miskin.

Tabel 1. 4
Pertumbuhan Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2017

Tahun	Pertumbuhan
2014	-2,5 %
2015	0,58%
2016	-3%
2017	-5,2%

Tabel 1.4 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2010-2017 yang cenderung menurun. Pada tahun 2014 – 2015 mengalami kenaikan sebesar 0.58 % dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2016-2017. Kartasasmita (2006) mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab yaitu, *Pertama*, rendahnya tingkat pendidikan. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kesempatan memiliki pekerjaan disektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. Taraf pendidikan yang rendah membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang. *Kedua*, rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. *Ketiga*, terbatasnya lapangan pekerjaan. Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. *Keempat*, Kondisi terisolasi. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Susiswo (2012) Kondisi kemiskinan di Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor pendidikan, angka buta huruf dan pengangguran. Dalam penelitian ini faktor yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah faktor kelayakan rumah dan ekonomi rendah, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat kelayakan rumah. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan rendah maka semakin rendah tingkat kelayakan rumah. Sedangkan, angka buta huruf dan pengangguran berpengaruh positif terhadap faktor ekonomi rendah. Semakin tinggi angka buta huruf dan pengangguran maka semakin tinggi pula masyarakat ekonomi rendah, begitupun sebaliknya. Fajriah dan Rahayu (2016) menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ialah tingkat partisipasi angkatan kerja, angka melek huruf, laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per-kapita. Kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja, angka melek huruf, laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per-kapita akan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal menurut Sukirno (2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan

ekonomi. Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota dibedakan menjadi atas urusan wajib dan urusan pilihan serta untuk melakukan kegiatan pembangunan.

Klasifikasi belanja menurut fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ada 11 fungsi yang menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebelas fungsi pemerintahan tersebut antara lain (1) fungsi pelayanan umum, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi ketertiban dan keamanan, (4) fungsi ekonomi, (5) fungsi lingkungan hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum, (7) fungsi kesehatan, (8) fungsi pariwisata dan budaya, (9) fungsi agama, (10) fungsi pendidikan dan (11) fungsi perlindungan sosial. Data mengenai jumlah pengeluaran pemerintah untuk bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.5 sebagai berikut.

Tabel 1. 5 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2014-2017(miliar rupiah)

No.	Provinsi	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	DKI Jakarta	4.143.489.829.828	5.454.177.678.915	4.557.358.688.274	2.418.933.122.295
2.	Jawa Barat	1.133.334.466.273	1.229.801.763.200	972.144.009.336	553.295.798.626
3.	JawaTengah	1.050.823.388.000	1.182.648.238.000	127.287.395.240	786.919.673.747
4.	DIY	370.393.726.239	405.494.771.351	363.624.768.512	408.569.991.667
5.	JawaTimur	2.161.719.436.000	2.798.432.812.490	1.910.974.076.518	2.393.375.500.900
6.	Banten	238.918.650.900	495.066.580.536	462.330.972.882	527.802.188.189

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah.

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi Jawa Timur terbilang tinggi dibanding provinsi lain setelah DKI Jakarta. Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi mengalami kenaikan sebesar 26,45 persen dibandingkan tahun 2014. Tahun 2016 mengalami penurunan 31,7 persen dibandingkan tahun 2015 sedangkan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 25,24 persen.

Salah satu upaya yang dijalankan provinsi Jawa Timur guna mengentaskan tingkat kemiskinan yaitu dengan melalui program Anti Poverty Program (APP). Program ini bertujuan dalam penanganan penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli, melalui pemberdayaan usaha Kelompok Masyarakat miskin dengan pola kemitraan yang berbasis cluster. Fokus utama pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga berupaya menciptakan kualitas pembangunan manusia. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan serta harapan hidup bagi masyarakat. Dengan

meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat penduduk miskinpun akan menurun.

Tabel 1. 6 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2014-2017(miliar rupiah)

No.	Provinsi	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	DKI Jakarta	8.196.069.414.255	9.134.991.221.897	9.965.902.517.656	5.487.314.503.212
2.	Jawa Barat	684.577.721.894	900.284.557.810	540.079.123.825	35.375.091.770
3.	JawaTengah	324.253.729.000	388.482.721.000	63.866.768.543	258.867.739.514
4.	DIY	326.872.544.761	352.403.703.595	355.999.483.223	316.973.245.082
5.	JawaTimur	531.299.931.000	544.119.084.350	251.204.341.996	1.707.762.818.000
6.	Banten	308.400.000.000	330.591.863.000	408.475.826.186	1.279.540.853.668

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah.

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan Jawa Timur terbilang tertinggi dengan menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2017 cenderung mengalami kenaikan, hanya di tahun 2015 terjadi penurunan anggaran. Pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mengalami kenaikan sebesar 2,4 persen dari tahun 2014. Tahun 2016 mengalami penurunan 53,8 persen dari tahun 2015 sedangkan tahun 2017 mengalami peningkatan proporsi anggaran yang sangat tajam dari tahun 2016.

Todaro dan Smith (2006) menyatakan pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas. Peningkatan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan lingkaran setan

kemiskinan. Penelitian dari Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K. (2011), menyatakan Pengeluaran pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Demikian pula dengan indikator yang berkaitan dengan pembangunan manusia, seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita perbulan, menunjukkan kecenderungan yang meningkat pula. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan maupun indikator pembangunan manusia, dibarengi dengan semakin membaiknya indikator kemiskinan yang ditandai dengan semakin menurunnya indikator jumlah dan persentase penduduk miskin.

Tabel 1. 7 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan di Pulau Jawa Tahun 2014-2017(miliar rupiah)

No.	Provinsi	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	DKI Jakarta	5.477.833.419.572	5.145.133.781.732	6.840.555.848.895	6.641.038.442.228
2.	Jawa Barat	572.856.381.490	992.556.227.055	459.011.045.931	674.807.884.825
3.	JawaTengah	1.625.097.866.000	1.931.665.175.000	684.291.595.945	1.413.684.878.982
4.	DIY	160.130.501.063	201.172.402.004	201.299.328.279	147.059.223.018
5.	JawaTimur	2.256.644.386.486	2.958.318.404.017	3.344.147.112.326	3.064.812.866.000
6.	Banten	395.090.502.500	363.491.928.905	452.451.000.000	519.534.901.000

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah.

Pada tabel 1.7 dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan di Jawa Timur terus meningkat, hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang selalu positif. Pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mengalami kenaikan sebesar 31,09 persen dari tahun 2014. Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 13 persen dibandingkan tahun 2015 sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan proporsi anggaran sebesar 8,35 persen.

Menurut Arsyad (1999) dalam Permana dkk (2012) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan *output* energi. Kesehatan adalah salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu masyarakat. Melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat di Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa program yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan adalah program kesehatan gratis, asuransi kesehatan, dan penggunaan kartu miskin (Misdawita dan Sari, 2013). Salah satu program kesehatan yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif, efisien dan akuntabel.

Tabel 1. 8 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Perlindungan Sosial di Pulau Jawa Tahun 2014-2017(miliar rupiah)

No.	Provinsi	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	DKI Jakarta	1.625.301.968.472	2.087.123.200.000	2.452.948.130.000	335.834.575.417
2.	Jawa Barat	139.424.386.160	144.139.332.516	141.781.859.338	141.837.007.533
3.	JawaTengah	251.676.291.000	319.532.343.000	27.358.065.972	199.522.233.324
4.	DIY	67.543.587.637	79.156.227.426	71.464.913.068	47.411.992.304
5.	JawaTimur	170.634.296.000	198.629.077.170	99.380.091.237	111.782.005.300
6.	Banten	91.885.000.000	113.118.577.000	131.544.392.635	80.881.987.000

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah.

Pada tabel 1.8 dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial di Jawa Timur mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan sebesar 16,4 persen dari tahun 2014. Tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 49,9 persen dari tahun 2015 sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 12,47 persen.

Dalam kebijakan sosial, perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan multidimensional (Edi Suharto, 2006). Perlindungan sosial merujuk kepada proses, kebijakan dan intervensi yang sebagian besar dikembangkan oleh pemerintah guna merespon resiko ekonomi, politik dan keamanan yang dihadapi oleh penduduk terutama penduduk miskin dan rentan. Salah satu program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah provinsi Jawa Timur yaitu Program Keluarga Harapan. Program ini melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Sustainable Development*

Goals (SDGs). Perlindungan sosial mempunyai keterkaitan dengan kemiskinan dan kerentanan di masa kini dan masa depan. Perlindungan sosial dapat menyediakan sokongan bagi kemiskinan, terutama bagi mereka yang termasuk ke dalam kategori sangat miskin. Program pemerintah sangat diperlukan guna membantu masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan serta mencegah kerentanan sosial dan ekonomi agar tidak terjatuh ke kondisi di bawah garis kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakat dan menuju masyarakat yang bebas dari kemiskinan. Belanja dari berbagai bidang tersebut diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi jumlah miskin. Pengurangan jumlah penduduk miskin tersebut diindikasikan dapat menurun sebagai pengaruh dari berbagai program dan kegiatan untuk penduduk miskin. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini dibatasi pada variabel pengeluaran pemerintah untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Hal ini dikarenakan, beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan banyak kebijakan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan melalui sekolah dan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Periode tahun dibatasi pada tahun 2014-2017. Selain karena penggunaan data tahun terbaru, hal ini juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di pedesaan pada periode tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Penelitian ini berakhir pada tahun 2017, tahun dimana pemerintah terakhir kali

mempublikasikan data. Penelitian ini diberi judul “*Pengaruh Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki persentase tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini ditunjukkan dalam data persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur terbesar ketiga dari provinsi lain di Pulau Jawa (Tabel 1.2). Pengentasan kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur dalam kurun waktu 2014-2017 memang dapat menurunkan angka penduduk miskin. Namun pada kenyataannya jumlah penduduk miskin masih tinggi relatif tinggi. Selain persentase tingkat kemiskinan yang tinggi, Provinsi Jawa Timur juga memiliki jumlah absolut penduduk miskin terbesar di Pulau Jawa.

Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama bagi pemerintah daerah untuk menyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari solusi untuk menanggulangi angka kemiskinan yang cukup tinggi. Pengeluaran pemerintah menurut fungsinya menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran tersebut antara lain adalah pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan

perlindungan sosial. Keempat fungsi tersebut merupakan faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas muncul pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017?
2. Bagaimana pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017?
3. Bagaimana pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017?
4. Bagaimana pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur periode 2014-2017.
2. Menganalisis pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur periode 2014-2017.

3. Menganalisis pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur periode 2014-2017.
4. Menganalisis pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang perlindungan sosial terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur periode 2014-2017.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam mendorong perekonomian, pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dan sumbangan pemikiran tentang, pembangunan ekonomi dan otonomi daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian, sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Penelitian mengenai tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, di mana dipengaruhi oleh alokasi pengeluaran daerah bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Selanjutnya dirumuskan Permasalahan Penelitian. Berdasarkan

perumusan masalah tersebut maka dikemukakan Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Telaah Pustaka

Menyajikan Landasan Teori, Penelitian Terdahulu Kerangka Pemikiran dan Hipotesis. *Grand Theory* membahas mengenai teori ekonomi publik yang kemudian didukung teori lain seperti teori pengeluaran pemerintah, konsep dan definisi kemiskinan, desentralisasi fiskal serta otonomi daerah.

BAB III. Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis yang terdiri atas model estimasi regresi, deteksi asumsi klasik dan pengujian model yang digunakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada. Data yang digunakan adalah data panel yang terdiri atas 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2014-2017 dengan metode analisis regresi data panel.

BAB IV. Hasil dan Analisis

Merupakan Hasil dan Pembahasan, berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, analisis perkembangan alokasi pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan

perlindungan sosial serta analisis data dengan menggunakan model *common effect* yang menjelaskan estimasi serta pembahasan yang menerangkan intrepretasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V. Penutup

Bab ini menguraikan Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran penelitian.